

KONSEP KESEJAHTERAAN PANDANGAN ULAMA KONTOMPORER

CONCEPT OF WELFARE CONTEMPORARY ULAMA'S VIEW

Nur Rachmat Arifin¹, Tamimah², Nida Laili Fitriyah³.

¹Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

²Sekolah Tinggi Agama Islam Terate, Sumenep, Jawa Timur, Indonesia

³Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

¹E-mail: nurrachmatarifin05@gmail.com

ABSTRAK

Ekonomi Islam salah satunya bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, kesejahteraan manusia yang dikemukakan di dalam Al-Qur'an berhubungan dengan kenikmatan dan kesengsaraan manusia di dunia dan akhirat, pembangunan dapat diraih apabila aspek kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik dapat diwujudkan secara nyata karena itu membangun kedaulatan ekonomi, Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menggunakan studi literatur, Hasil penelitian ini, kesejahteraan dalam perpektif Islam mengacu pada tujuan Islam, yaitu terimplementasi dan terjaganya lima prinsip dasar yang terkandung dalam *Maqasid Syariah* dari segala sesuatu yang merusak sehingga tercapainya kehidupan yang lebih baik dan terhormat di dunia dan di akhirat.

Kata kunci: Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan, *Maqasid Syariah*.

ABSTRACT

Islamic economics, one of which aims to prosper people's lives, human welfare stated in the Qur'an is related to human enjoyment and misery in the world and the hereafter, development can be achieved if aspects of economic sovereignty and good economic governance can be realized significantly because it builds economic sovereignty, this research uses qualitative research using literature studies, the results of this study, welfare in the Islamic perspective refers to the goals of Islam, namely the implementation and maintenance of the five basic principles contained in Maqasid Syariah from

everything that is destructive so as to achieve a better life and honorable in this world and in the hereafter.

Keywords: Development Economics, Welfare, Maqasid Syariah.

Pendahuluan

Permasalahan ekonomi tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian kehidupan manusia, yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang dan papan, dan keinginan, untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya, sewajarnya manusia untuk melakukan segala aktifitas yang telah disediakan alam semesta ini, dengan memenuhi hal tersebut manusia untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat adz-Dzariyat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”* (Qs. Adz-Dzariyat 51: 56).

Manusia diciptakan dimuka bumi sebagai *khalifah*, Agama Islam menghendaki supaya manusia bersifat adil, keadilan dapat dicapai dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya, hendaknya manusia memandang sesuatu aktifitas tersebut tidak lain untuk menyempurnakan pengabdianya kepada Allah SWT, sesuai dengan fungsi diciptakannya manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT, dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak akan melakukan aktifitas yang saling menjatuhkan dengan lainnya, pada saat manusia dalam keberlangsungan hidupnya untuk memiliki rasa kebersamaan tidak akan muncul aktifitas ekonomi yang dilarang oleh Islam seperti adanya riba, penimbunan harta, tidak

memberikan upah kerja, memanipulasi harga, dan monopoli, dalam perspektif Islam, bahwasanya kebijakan ekonomi berarti suatu sistem pengaturan yang sanggup mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat yang wajar dan adil¹.

Kebijakan ekonomi Islam salah satunya bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, kesejahteraan manusia yang dikemukakan di dalam Al-Qur'an berhubungan dengan kenikmatan dan kesengsaraan manusia di dunia dan akhirat, dan kriteria obyektif sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi seperti makanan, pendidikan perumahan, barang-barang dan jasa-jasa lainnya dan komoditi-komoditi no-matriteil seperti kesenantiasaan. Konsep ini mengutamakan pemuasan terhadap keinginan-keinginan yang bermanfaat, menolak keinginan-keinginan yang tidak bermanfaat, dan mendorong manusia untuk mengarahkan sumber-sumber manusiawi dan materilnya untuk memenuhi sesuai keinginan-keinginan masyarakat.

Mendiskusikan kesejahteraan dalam perspektif Islam di Negara Indonesia, Indonesia bukan saja negara yang memiliki sumberdaya alam yang luar biasa, melainkan pula merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Al-Baqarah di atas, sejatinya memiliki nilai mengenai pentingnya kesejahteraan masyarakat ketimbang sekadar menghadapkan wajah kita ke barat atau timur dalam shalat, tanpa memarginalkan pentingnya shalat, Al-Qur'an mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan kebijakan dan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain memberi pesan tentang keimanan, Al-Qur'an mengingatkan penganutnya bahwa pernyataan keimanan kepada Allah,

¹ Chapra, U, *Sistem Moneter Islam*. Solo: Aqwam, 2018.

kitabnya, dan hari kiamat saja, dapat dikatakan tidak cukup jika tidak disertai dengan kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan pertolongan.²

Namun kenyataannya, Indonesia adalah negara yang masih menghadapi persoalan kesejahteraan yang serius. Ironisnya, kontribusi negara sebagai institusi yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata masih jauh dari harapan. Berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik di Indonesia seringkali disebabkan oleh kegagalan negara dalam memainkan perannya dengan baik. Seakan-akan negara tidak pernah dirasakan kehadirannya terutama oleh mereka yang lemah atau dilemahkan, yang miskin atau dimiskinkan.

Menurut Dr. Aviliani selaku Pendiri INDEF dan Advisor Menteri Desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang menyampaikan Peran Pemerintah terhadap empat Sektor, salah satunya kesejahteraan. Pemerintah telah mengupayakan meningkat kesejahteraan pada penduduk miskin dengan berbagai program kegiatan diantaranya dana desa, dana desa yang dianggarkan pada setiap tahunnya dan mengalami peningkatan, dengan harapan dan dianggarkan dapat mengestaskan kemiskinan, terciptanya kesejahteraan akan tetapi real faktanya masyarakat masih belum bisa merasakan kesejahteraan yang digambarkan pejabat pemerintah tersebut, pada tahun ini program tersebut telah memakan dana pemerintah sampai tujuh puluh triliun dan belum dapat menyerat kemiskinan dan mensejahterakan rakyat Indonesia, maka dengan mini paper riset ini penulis mencoba memberikan gambaran

² Suharto, E. *Islam dan Negara Kesejahteraan*, Maret 15, hal1-12. 2006.

konsep kesejahteraan dalam Islam yang pernah diajarkan oleh para ulama Islam.

Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang berfokus pada kesejahteraan salah satunya adalah (Amirus, 2015:380) membahas mengenai konsep kesejahteraan dalam Islam. Menurutny dalam Al-Quran telah disebutkan tiga indicator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan dimana dalam Islam adalah tauhid, konsumsi, dan hilangnya segala bentuk ketakutan dan kecemasan. Adapun menurutny kepedulian sosial yang bisa dilakukan umat muslim diwakili dengan zakat, dimana memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.

Martini berpendapat pembahasan berfokus pada kesejahteraan dalam perspektif islam untuk pemenuhan Maqasid Syariah. Mewajibkan pemenuhan kebutuhan manusia secara material dan spiritual yang terjalin dengan erat, berjuang untuk sebuah keseimbangan antara kepentingan individu dan social. Ia juga menjelaskan dengan lebih rinci bahwa tujuan dari syariah adalah memperbaiki kesejahteraan seluruh umat manusia yang mana terletak dalam perlindungan terhadap keimanan (*ad-diin*), jiwa (*an-nafs*), intelektual (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*) dan kekayaan (*al-maal*). Segala sesuatu yang memastikan perlindungan terhadap kelima hal tersebut yang menjamin kepentingan public seperti yang diinginkan.

Johari membahas mengenai bagaimana kesejahteraan mualaf bisa tercipta berkat penggunaan dana zakat. Dimana kesejahteraan bukan hanya bagi mereka kamu muslim lama, tetapi juga harus tercipta untuk mereka yang baru memeluk Islam. Hal ini penting agar keikutsertaan mereka ke dalam

ajaran Islam tidak lantas fenomena awal saja, sebagai sesame kaum muslim kita harus saling membantu, dalam konteks ini muslim lama memberikan tuntunan dan rasa nyaman kepada para muallaf tersebut. Sebagai salah satu dari beberapa instrumen oleh Islam, Zakat penting untuk memerangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Elviandri berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti membahas mengenai konsep negara kesejahteraan⁴. Untuk merumuskan negara kesejahteraan dari maqasid al-shari'ah, dibangun melalui pemenuhan tiga tingkat kebutuhan individu (warga negara) (*al-Daruriyah*, *al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyah*, primer, sekunder dan hak supplementary), kebutuhan masyarakat (pemerataan; *al-hajah al-'ammah*), perlindungan atau jaminan (*Isma al*), dan penegakan hukum (*al muat*), kesetaraan (*al-musawah*), kebebasan (*al-Hurriyah*), kemurahan hati (*al-samhah*). Melalui penggabungan peran negara dan masyarakat sipil, konsep negara kesejahteraan berdasarkan Maqasid al-Shari'ah dapat dicapai dan dapat menjadi langkah awal untuk mencapai kemakmuran bagi masyarakat.⁵

Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian akan menggambarkan pemecahan masalah yang diselidiki untuk memperoleh jawaban yang terkait pendapat, tanggapan ataupun persepsi seseorang sehingga penjelasan akan teruraikan secara tulisan. Untuk

³ Johari, Fuadah dkk. 2013. The Roles of Islamic Social Welfare Assistant (Zakat) for the Economic Development of New Convert. *Middle-East Journal of Scientific Research* 18 (3): 330-339

⁴ Elviandri, The formulation of welfare state the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah. *Indonesian Journal Of Islamic and Muslim Societies* Vol. 8 No.1, 2018.

⁵ Pusparini, Martini Dwi. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam. *Islamic Economic Journal* Vol.1 No.1, 2015.

mendukung penelitian deskriptif ini, metode studi kepustakaan dilakukan oleh penulis. Studi kepustakaan adalah rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengelolah bahan seleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Studi pustaka merupakan langkah awal mengumpulkan data, pencarian data berupa informasi melalui dokumen-dokumen, baik tertulis, foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penelitian.

3.2 Sumber Data

Macam data ada dua, yakni data primer dan data sekunder. Untuk melengkapi penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang bersumber dari tangan pertama atau langsung dari subjek. Pada paper ini sumber data primer yang di dapat adalah terkait buku-buku yang membahas mengenai lembaga keuangan Islam, sistem keuangan Islam, lembaga keuangan mikro Islam, dan koperasi syariah.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan diperoleh dari situs, jurnal internasional maupun nasional, maupun tulisan-tulisan yang relevan terkait dengan topik penelitian.

Pembahasan

4.1 Pendapat Ulama Kontemporer tentang Maqasid Syariah

No	Nama Ulama	Pendapat
1.	Rasyid Ridi	Menyarankan bahwa tujuan pokok syariah adalah • Reformasi pilar-pilar keimanan

		• Mensosialiasi Islam sebagai agama fitrah alami • Menegakkan peran akal, pengetahuan, hikmah, dan logika yang sehat • Kebebasan • Reformasi social, politik, dan ekonomi • Hak hak perempuan
2.	Al-Thahir ibn ‘Asyur	Mengemukakan bahwa tujuan pokok universal hokum islam meliputi • Ketertiban • Kesetaraan • Kebebasan • Kemudahan • Pelestrarian fitarh manusia
3.	Muhammad Al-Ghazali	• Mengkritik kecenderungan penafsiran harfiah • Berpendapat reformis dalam bidang HAM dan hak-hak perempuan
4.	Yusuf Al-Qardhawi	Menyarankan bahwa pokok syariah menurut Al-Qur’an • Pelestarian akidah • Penyembahan Allah SWT • Penjernian jiwa • Perbaikan akhlak • Pembangunan keluarga • Memberlakukan perempuan dengan adil • Pembangunan bangsa muslim kuat • Kerjasama antar ummat manusia

5.	Taha Jabir al-Alwani	Mengusulkan bahwa tujuan pokok syariat menurut Al-Qur'an
----	----------------------	--

4.2 Konsep Kesejahteraan dalam Islam

Ditilik dari kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentora, makmur dan selamat, atau bisa juga diartikan sebagai ungkapan yang menunjukkan keadaan yang baik-baik saja. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jertaan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah.⁶ Dalam UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan social warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kebahagiaan merupakan suatu hal yang dirasakan dan dipersepsikan secara berbeda oleh setiap orang, karena itu pengukuran kebahagiaan merupakan hal yang subyektif. Dalam hal ini, kebahagiaan menggambarkan indikator kesejahteraan subyektif yang digunakan untuk melengkapi indikator obyektif. Menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempa tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan,

⁶ Sodiq, Amirus. Konsep kesejahteraan dalam Islam. *Equilibrium* Vol. 1 No 1, 2015.

kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Keterbatasan indikator ekonomi dalam merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat telah meningkatkan perhatian dunia terhadap aspek sosial dalam pembangunan. Kemajuan pembangunan yang selama ini lebih banyak dilihat dari indikator ekonomi, seperti: pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dinilai belum cukup untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Indikator ekonomi tersebut pada umumnya diukur secara obyektif dengan pendekatan berbasis uang (*monetary-based indicators*)⁷.

Istilah umum yang digunakan dalam mendiskripsikan kehidupan yang sejahtera secara material dan spiritual dalam ajaran Islam adalah *falah*. Konsep *falah* ini mengacu pada tujuan Islam yang juga merupakan tujuan ekonomi Islam, yaitu terimplementasi dan terjaganya lima prinsip dasar yang terkandung dalam *Maqasid Syariah* dari segala sesuatu yang merusak sehingga tercapainya kehidupan yang lebih baik dan terhormat di dunia dan di akhirat. Pemikiran konvensional tentang kesejahteraan lebih banyak bertujuan pada terpenuhinya kebutuhan seseorang dalam hal materi, kesejahteraan spiritual agaknya mendapatkan porsi perhatian yang lebih sedikit daripada kesejahteraan yang bersifat spiritual.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distribusi, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, hal ini tentu akan meningkatkan pendapatan riil masyarakat dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Untuk tingkat pengangguran

⁷ Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik, Februari 2015.

yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius⁸. Menurut Imam Al-ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban social masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.⁹

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4, *"Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut"* berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indicator kesejahteraan dalam Al-Qur'an tiga, yaitu menyembah Tuhan, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah, indicator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indicator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan. Kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi) dalam ekonomi Islam

⁸ Arifin, N. R. (2020). Manajemen Wakaf Sebagai Pembiayaan Barang Publik Dan Barang Publik Campuran Di Indonesia. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 1(2), 246-264.

⁹ Pusparini, Martini Dwi. 2015. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam. *Islamic Economic Journal* Vol.1 No.1

terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal. Ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Rasulullah Saw bersabda “*Kaya bukanlah karena kebanyakan harta, tetapi kaya adalah kaya jiwa*” (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah), hadits tersebut juga menjelaskan bahwa pembangunan moral dan mental lebih utama dari pada pemenuhan tingkat pendapatan, secara logika pembangunan moral dan mental akan menghasilkan SDM yang berkualitas, dengan SDM yang berkualitas akan menghasilkan peningkatan total output, dengan begitu maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat.

4.3 Indikator Kesejahteraan dalam Islam

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan kesejahteraan akan lahir. namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergisitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar *growth with equity* betul-betul dapat direalisasikan. Namun demikian konsep dan definisi kesejahteraan ini sangat beragam bergantung pada perspektif apa yang digunakan. Dalam konteks ini, maka filosofi kesejahteraan sebagaimana yang dinyatakan dalam Qs.10:1-4 merupakan salah satu konsep yang layak untuk mendapatkan

perhatian. Jika merujuk pada ayat-ayat tersebut maka konsep kesejahteraan ini memiliki empat indikator utama.



Sumber: (Syauqi Beik & Dwi Arsyianti, 2017)

Keempat indikator tersebut adalah sistem nilai Islami, kekuatan ekonomi di sektor riil (industri dan perdagangan) pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi serta keamanan dan ketertiban sosial.¹⁰

Pada indikator pertama basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika kita menentang secara diametral aturan Allah SWT. Penentangan terhadap aturan Allah SWT justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia berdasarkan QS Thaha: 124.

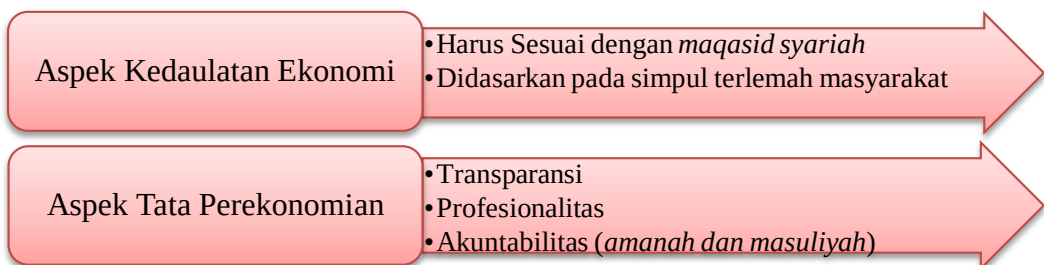
Pada indikator kedua kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor riil inilah yang menyerang angkatan kerja paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah, bahkan sektor keuangan dalam Islam di desain untuk memperkuat kinerja sektor riil karena seluruh akad dan transaksi keuangan syariah berbasis pada sektor riil.

¹⁰ Syauqi Beik, I, & Dwi Arsyianti, L. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Indikator ketiga adalah pemenuhan dasar dan sistem distribusi. Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Demikian pula apabila yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat sementara sebagian yang lain tidak bisa, dengan kata lain sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali (Qs. Al-Hasyr: 7).

Sedangkan pada indikator yang keempat kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antar kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir, tidak mungkin kesejahteraan akan dapat diraih melalui rasa takut dan tidak aman.

Kesejahteraan sebagai tujuan utama, pembangunan dapat diraih apabila aspek kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik dapat diwujudkan secara nyata karena itu membangun kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik merupakan prasyarat utama bagi tercapainya kondisi sejahtera masyarakat dan bangsa.



Sumber: (Syauqi Beik & Dwi Arsyianti, 2017)

Dalam pandangan ajaran Islam penegakan kedaulatan ekonomi merupakan sebuah keniscayaan. Kedaulatan ekonomi ini adalah hal yang sangat esensial dan fundamental bagi setiap bangsa titik kedaulatan ekonomi sangat menentukan kedaulatan bangsa, apakah bangsa tersebut akan dengan mudah didikte oleh kepentingan asing atau tidak. Jalan untuk menegakkan kedaulatan ekonomi ini tidak lain adalah melalui kebijakan ekonomi yang berbasis pada konsep Maslahah.

Maslahah adalah suatu konsep yang mendasarkan pada dua aspek utama yaitu manfaat dan berkah. kemaslahatan akan tercapai ketika yang muncul dari sebuah proses adalah kemanfaatan dan keberkahan. Namun demikian tidak semua yang bermanfaat akan memberikan keberkahan, akan tetapi semua yang berkah pasti manfaat. Sebagai contoh, minuman keras barangkali memberikan manfaat ekonomi berupa pajak, namun bisa dipastikan bahwa minuman keras pasti membawa pada ketidak berkah dan mudharatnya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. (Qs. Al-Baqarah: 219, Qs. Al-Maidah 90-91).

Agar kebijakan yang dihasilkan dapat membawa manfaat dan keberkahan sehingga akan memperkuat kedaulatan ekonomi negara maka ada dua syarat yang harus dipenuhi kedua cara tersebut adalah

1. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan maqashid syariah atau tujuan syariat Islam. Yaitu melindungi agama jiwa harta keturunan dan akal.
2. Dasar dua orientasi kebijakan tersebut adalah pada perlindungan kepentingan kaum dhuafa

Selanjutnya aspek kedua yang dapat mengakses lokasi terwujudnya kesejahteraan adalah aspek tata kelola perekonomian. Tata kelola ini

merupakan variabel yang sangat penting karena ia terkait dengan bagaimana mengelola sebuah perekonomian. Tentu saja tata kelola ini tidak bisa dipisahkan dari tiga hal yang sangat fundamental yaitu transparansi dan profesionalitas. Transparansi merupakan hal yang sangat mendasar, ia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keterbukaan dan kemudahan dalam memberikan akses informasi kepada public. Tata kelola perekonomian yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan. Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan harus memiliki ruang untuk mengakses beragam informasi yang relevan serta memberikan masukan dan saran bagi perbaikan kinerja perekonomian¹¹.

Selanjutnya indikator yang kedua adalah profesionalitas. Profesionalitas ini merupakan prinsip dasar yang menjamin bekerjanya mesin perekonomian serta menentukan kualitas output yang dihasilkannya. Ajaran Islam telah memerintahkan umat ini untuk senantiasa profesional (*itqan*) sehingga segala potensi dan sumber daya yang dimiliki dapat dioptimalkan. Profesionalitas juga akan meningkatkan Efisiensi dan efektivitas pengelolaan perekonomian dalam mencapai tujuannya.

Sedangkan indikator terakhir dari tata kelola ini adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*amanah* dan *mas'uliyah*). Ajaran Islam adalah ajaran yang sangat menekankan pentingnya aspek pertanggungjawaban. Setiap orang pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukannya. Dalam konteks tata kelola perekonomian, pertanggungjawaban ini sangat erat kaitannya dengan aspek administratif dan aspek etika.

Pertanggungjawaban administratif merupakan instrumen yang menjamin setiap rupiah yang dikeluarkan akan selaras dengan tujuan

¹¹ Utama, R. W. A., Muhtadi, R., Arifin, N. R., & Mawardi, I. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10, 242-259.

pembangunan ekonomi tanpa terkontaminasi oleh korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sementara pertanggungjawaban etika merupakan instrumen yang menjamin kepatutan dan kewajaran suatu aktivitas perekonomian. Segala sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara etika.

Sebagai contoh penetapan margin profit dalam akad murabahah yang disepakati oleh bank syariah dan nasabah harus didokumentasikan dengan baik dan harus tertuang dalam naskah kesepakatan yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini adalah bentuk pertanggungjawaban administrative. Namun pertanyaannya jika pertanyaan margin profit tersebut nilainya sebesar 200%, maka apakah secara etika dapat dipertanggungjawabkan meskipun itu merupakan hasil kesepakatan? tentu saja hal tersebut kurang pas secara etika.

Pertanggungjawaban etika memberi rambu-rambu yang dapat menghindarkan kita dari eksploitasi sumber daya ekonomi secara berlebihan dan tidak wajar. Contoh lain adalah Apakah etis jika lembaga zakat menggunakan 100% dana infaq untuk beriklan meski secara fiqih ada keleluasaan untuk memanfaatkan dana infaq untuk apa saja asalkan untuk kepentingan kebaikan namun secara etis pemanfaatan seluruh dana infaq untuk iklan lembaga zakat merupakan langkah yang kurang tepat dan kurang etis jikalau ingin memanfaatkan dana infaq untuk iklan maka sebaiknya dibatasi proporsi yang dapat digunakan misal maksimal 20% yang memenuhi unsur pertanggung jawaban etika.

Kesimpulan

1. Kesejahteraan dalam perpektif Islam mengacu pada tujuan Islam, yaitu terimplementasi dan terjaganya lima prinsip dasar yang terkandung

dalam *Maqasid Syariah* dari segala sesuatu yang merusak sehingga tercapainya kehidupan yang lebih baik dan terhormat di dunia dan di akhirat

2. Indikator Kesejahteraan dalam Islam :
 - a. Sistem nilai Islami,
 - b. Kekuatan ekonomi di sektor riil (industri dan perdagangan)
 - c. Pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi
 - d. Keamanan dan ketertiban sosial.
3. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan kebijakan :
 - a. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan maqashid syariah atau tujuan syariat Islam. Yaitu melindungi agama jiwa harta keturunan dan akal.
 - b. Dasar dua orientasi kebijakan tersebut adalah pada perlindungan kepentingan kaum dhuafa.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik, Februari 2015.
- Chapra, U. (2018). *Sistem Moneter Islam*. Solo: Aqwam.
- Dwi Pusparini, M. (2015). Konsep Kesejahteraan dalam Islam. *Islamic Economics Journal*, 45-56.
- Edi Suharto, P. (2006). Islam dan Negara Kesejahteraan.
- Elviandri dkk. 2018. The formulation of welfare state the perspective of Maqāṣid al-Sharī‘ah. *Indonesian Journal Of Islamic and Muslim Societies* Vol. 8 No.1
- Johari, Fuadah dkk. 2013. The Roles of Islamic Social Welfare Assistant (Zakat) for the Economic Development of New Convert. *Middle-East Journal of Scientific Research* 18 (3): 330-339
- Muhtadi, R., Safik, M., & Mansur, M. (2020). Tinjauan Ekonomi Islam Pada Konsep Kepemilikan Dalam Konteks Indonsia. *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 106-120.
- Pusparini, Martini Dwi. 2015. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam. *Islamic Economic Journal* Vol.1 No.1
- Sodiq, Amirus. 2015. Konsep kesejahteraan dalam Islam. *Equilibrium* Vol. No.
- Suharto, E. (2006, Maret 15). Islam dan Negara Kesejahteraan . pp. 1-12.
- Syauqi Beik, I., & Dwi Arsyianti, L. (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.